

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku, Laporan Penelitian, Jurnal, Skripsi:

- Abbas, Syahrizal, 2011, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta
- Emirzon, Joni, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Gramedia, Jakarta.
- Fuadi, Munir, 1999, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2004, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartini, Rahayu, 2007, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang.
- Hartono, Siti Soemarti, 1993, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Hidayat, Maskur, 2016, *Strategi Dan Taktik Mediasi*, Kencana, Jakarta.
- Hutagalung, Sophar Maru, 2012, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lontoh, Rudhy A, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- N.D, Mukti Fajar., dan Achmad, Yulianto, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Nugroho, Susanti Adi, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu, Jakarta.

- Prodjohamidjojo, Martiman, 1999, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung.
- Rahmadi, Takdir, 2011, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sastrawidjaja, H. Man S, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Usman, Rachmadi, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wijayanta, Tata, 2016, *UU dan Praktik Kepailitan; Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sudewi, Ifa, 2014, *Laporan Penelitian Pengkajian Pelaksanaan Diklat Sertifikasi Hakim Niaga*.
- Wijayanta, Tata, “Perkembangan Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) dalam Putusan Kepailitan Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum UGM, Volume 19, Nomor 3, 2007, hlm. 425.
- , “Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Perkara Perniagaan Lain Berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2004”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum UGM, Volume 20, Nomor 2, 2008, hlm. 385.
- Adrianto, Albertus Novan, 2014, “Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 di Pengadilan Negeri Yogyakarta”, *Skripsi*, Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum UGM, Tidak dipublikasikan, Yogyakarta.
- Mokoginta, Irvan Muhammad, 2016, “Pelaksanaan Mediasi Teleconference dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bale Bandung”, *Skripsi*, Bagian Hukum

Acara Fakultas Hukum UGM, Tidak dipublikasikan, Yogyakarta.

Perkasa, Rizky Angger, 2014, “Eksistensi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Menyelesaikan Perkara Kepailitan”, *Skripsi*, Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum UGM, Tidak dipublikasikan, Yogyakarta.

#### **B. Internet :**

Sandiawati, Diani “Eksistensi Pengadilan Niaga dan Perkembangannya Dalam Era Globalisasi”, [https://www.bappenas.go.id/files/9013/6082/9890/12eksistensi-pengadilan-niaga-dan-perkembangannya-dalam-era-globalisasi\\_\\_20081123185136\\_\\_1261\\_\\_11.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/9013/6082/9890/12eksistensi-pengadilan-niaga-dan-perkembangannya-dalam-era-globalisasi__20081123185136__1261__11.pdf), diakses pada tanggal 19 Mei 2017, Pukul. 14.00 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bb37cac5b54/info-penting-ma-terbitkan-prosedur-mediati-terbaru>, diakses pada tanggal 22 Juni 2018, Pukul 03.30 WIB.

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

#### **D. Wawancara :**

Afdlori, 2017, Permohonan Kepailitan di Pengadilan Niaga Semarang, *Wawancara*, Semarang, 10 November.

Purba, Efendi, 2018, Kendala dilaksanakannya Mediasi dalam Permohonan Kepailitan di Pengadilan Niaga, *Wawancara*, Yogyakarta, 6 Juli.

Subroto, Agus, 2017, Mediasi di Pengadilan Niaga, *Wawancara*, Yogyakarta, 15 Desember.